

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga kemasyarakatan nagari, dari 3 unsur elemen yang terlibat yakni pengurus lembaga, anggota lembaga dan masyarakat belumlah sepenuhnya melakukan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari.

Dalam pelaksanaan fungsi, lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari 7 lembaga formal, yakni KAN, LPMN, TP PKK, MUI Nagari, Parik Paga Nagari, Bundo Kandung Nagari dan Karang Taruna Panbers mengedepankan dan menjadikan hirarki partisipasi politik sebagai prioritas dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari. Sementara dalam kegiatan partisipasi politik pada lembaga dimaksud berupa partisipasi aktif, partisipasi pasif dan partisipasi apatis.

2. Partisipasi politik masyarakat Nagari Panampuang sebagaimana yang peneliti sampaikan sebelumnya, bahwa ada dua kategori partisipasi politik, yakni, partisipasi dalam pemilihan dan partisipasi dalam kelembagaan.

Partisipasi dalam pemilihan di Nagari Panampuang menerangkan bahwa tingkat persentase partisipasi politik masyarakat akan semakin besar manakala terdapatnya faktor yang mempengaruhi seperti faktor kekeluargaan, faktor domisili, faktor ketokohan, dan faktor pengaruh dan ikut-ikutan, serta terdapat juga faktor-faktor khusus yang mempengaruhi, selain itu partisipasi politik juga dipengaruhi dengan kondisi bahwa pemimpin yang akan dipilih merupakan tokoh yang dekat dan dikenal oleh masyarakat Nagari Panampuang..

Partisipasi politik dalam kelembagaan akan meningkat dan besar ketika banyaknya masyarakat terlibat dalam kepengurusan, namun partisipasi politik tidak akan nampak kecuali hanya oleh pengurus inti tatkala dalam melaksanakan fungsi kelembagaan tersebut.

3. Sementara dalam melihat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari, dapat dilihat dari 5 bentuk kategori partisipasi politik yakni:
 - a. Kegiatan pemilihan, masyarakat Nagari Panampuang terlibat secara aktif maupun masif, baik sebagai pelaksana, kontestan maupun sebagai pemberi suara. Semua lembaga kemasyarakatan nagari melakukan bentuk partisipasi politik berupa kegiatan pemilihan.
 - b. Lobi merupakan salah satu cara yang dilakukan pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari Panampuang dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan fungsi sebagai lembaga kemasyarakatan. Kegiatan partisipasi politik dalam bentuk lobi ini diterapkan dalam lembaga kemasyarakatan nagari, namun tidak semua lembaga yang ada dapat melakukan bentuk partisipasi politik ini.
 - c. Kegiatan organisasi menjadi faktor utama dalam mewujudkan fungsi lembaga kemasyarakatan, tanpa adanya kegiatan organisasi maka secara tidak langsung lembaga kemasyarakatan tidak melaksanakan fungsinya. Bentuk partisipasi berupa kegiatan organisasi menjadi suatu syarat dalam melaksanakan kegiatan lembaga, sehingga bentuk partisipasi ini senantiasa terlaksana.
 - d. Mencari koneksi menjadi alternatif yang signifikan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah Nagari Panampuang, dengan adanya bantuan dari pejabat-pejabat tertentu akan memberikan manfaat bagi terwujudnya fungsi lembaga kemasyarakatan nagari. Bentuk partisipasi berupa mencari koneksi menjadi suatu cara yang sering dipergunakan dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari dan untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah Nagari.
 - e. Tindakan kekerasan tidak dan belum pernah terjadi di Nagari panampuang, akan tetapi hal ini bisa saja terwujud, bilamana adanya tuntutan dari masyarakat yang tidak di akomodir oleh pemerintahan Nagari Panampuang. Apalagi tuntutan masyarakat tersebut ada regulasi yang mendukung. Bentuk partisipasi berupa tindakan kekerasan tidak terjadi dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari dan kebijakan

Pemerintah Nagari. Akan tetapi jika tidak menjadi perhatian khusus oleh pemerintahan nagari, tindakan kekerasan ini bisa saja terjadi kedepannya.

Dari 5 bentuk partisipasi politik masyarakat, hanya 4 bentuk yang telah terjadi dan selalu akan berlangsung di dalam pelaksanaan lembaga kemasyarakatan nagari. Sementara bentuk partisipasi berupa tindak kekerasan tidak terjadi dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan Nagari Panampuang belumlah memberikan sumbangsih yang begitu nyata dalam pemerintahan Nagari Panampuang. Mesti harus lebih ada pengkajian yang lebih dalam bagaimana fenomena partisipasi politik masyarakat itu sendiri dan juga tentang pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari.
2. Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari mesti selalu dibina dan ditingkatkan. Pemerintah nagari harus peka dan aktif untuk melibatkan selalu lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra pemerintah nagari. Sedangkan lembaga kemasyarakatan nagari harus sadar akan fungsi mereka sebagai perpenjangtangan dan wadah partisipasi dari masyarakat nagari.